

TUGAS AKHIR
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA
DAERAH DITINJAU DARI PRINSIP DEMOKRASI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Mochamad Rizky Ferdiansyah Ramadhani

NIM: 202110110311410

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2025

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-
XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH
DITINJAU DARI PRINSIP DEMOKRASI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MOCHAMAD RIZKY FERDIANSYAH RAMADHANI
NIM: 202110110311410

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA
DAERAH DITINJAU DARI PRINSIP DEMOKRASI**

Diajukan Oleh:

MOCHAMAD RIZKY FERDIANSYAH RAMADHANI

202110110311410

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama,


Dr. Catur Wido Harjhi, SH., M.Si., M.Hum

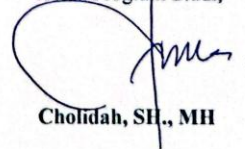
Pembimbing Pendamping,


Fitriah Esjandiari, SH., M.H.



ongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MOCHAMAD RIZKY FERDIANSYAH RAMADHANI

202110110311410

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

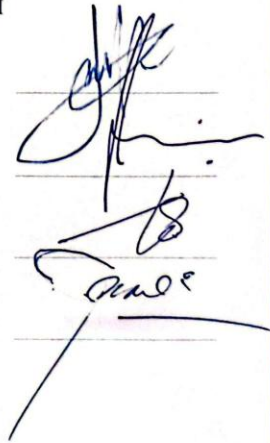
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Penguji II : Sumali, SH., M.Hum

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be those of the members of the exam board listed to the left.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MOCHAMAD RIZKY FERDIANSYAH RAMADHANI

NIM : 202110110311410

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI PRINSIP DEMOKRASI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 25 April 2025


Mochamad Rizky Ferdiansyah Ram

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

“Orang lain gak akan bisa faham *struggle* dan masa sulit nya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

Motto

“Tidak usah menjelaskan tentang dirimu pada siapapun, karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya, dan orang yang membencimu tidak akan peduli” - Ali bin Abi Thalib

“Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya, dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.” - Aristoteles

ABSTRAKSI

Nama : Mochamad Rizky Ferdiansyah Ramadhani
NIM : 202110110311410
Judul : **Analisi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi**
Pembimbing : **1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.**
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 membuka peluang lebih luas bagi partai politik kecil dan calon independen. Penelitian ini membahas terkait dasar pertimbangan hukum hakim dan menganalisis implikasinya terhadap demokrasi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan partisipasi politik dan inklusivitas pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini serta implikasi hukumnya terhadap prinsip demokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa MK menurunkan ambang batas pencalonan dari 20%-25% menjadi 6,5%-10% berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut. MK beralasan bahwa ketentuan sebelumnya membatasi hak politik dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang lebih terbuka. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa putusan MK membawa perubahan penting dalam sistem pemilihan kepala daerah, meskipun tetap perlu ada pengawasan agar tidak terjadi politik yang terlalu terfragmentasi. Maka dari itu perlu diberikan regulasi lanjutan untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik tanpa mengurangi kualitas demokrasi dan kepemimpinan daerah.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Ambang Batas, Demokrasi.

ABSTRACT

Nama : Mochamad Rizky Ferdiansyah Ramadhani
NIM : 202110110311410
Judul : *Juridical Analysis Of Constitutionan Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 Concerning The Threshold For Regional Head Nominations Reviewed From The Principles Of Democracy*
Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

The Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 opens up wider opportunities for small political parties and independent candidates. This study discusses the basis for the judge's legal considerations and analyzes its implications for Indonesian democracy, especially in increasing political participation and election inclusiveness. This study aims to examine the basis for the legal considerations used by the judge in deciding this case and its legal implications for the principles of democracy. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material collection techniques for document studies and literature studies. The results of the study show that the Constitutional Court lowered the nomination threshold from 20%-25% to 6.5%-10% based on the population in the area. The Constitutional Court argued that the previous provisions limited political rights and did not reflect the principles of a more open democracy. Based on the results of the research and discussion, it is known that the Constitutional Court's decision brought important changes to the regional head election system, although supervision is still needed so that politics does not become too fragmented. Therefore, further regulations need to be provided to ensure that this policy runs well without reducing the quality of democracy and regional leadership.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Threshold, Democracy.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi”**. Tak lupa Penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita serta menunjukkan jalan yang terang, semoga syafaatnya dapat kita peroleh di yaumul akhir kelak, Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa dan bantuan banyak pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moriil maupun materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang Penulis hormati :

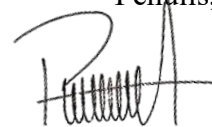
1. Kedua orang tua Penulis yang Penulis sayangi dan patuhi, terima kasih untuk Bapak Tarmuji dan Ibu Dewi Kholiyah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang yang tulus, dan telah memberikan semangat kepada Penulis serta lantunan doa yang tak pernah putus untuk segala kemudahan dan kelancaran hidup Penulis. Tanpa itu semua, tidak mungkin Penulis bisa semangat dan berjuang sampai sekarang.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang serta para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana belajar yang memadai di kampus.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., Dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
4. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada Penulis untuk membimbing, memberi petunjuk, arahan dan saran-saran yang sangat membangun dan memotivasi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada Penulis untuk membimbing, memberi

petunjuk, arahan dan saran-saran yang sangat membangun dan memotivasi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan, semangat dan perhatian selama masa perkuliahan. Terimakasih telah sabar menghadapi mahasiswa yang kadang suka bingung sendiri. Dukungan ibu sangat berarti bagi Penulis sampai bisa berada dititik ini.
7. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada Penulis selama perkuliahan.
8. Kepada adik yang penulis cintai dan banggakan Rizka Khoirunnisa yang telah menyemangati untuk menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini. Tetap semangat dan kita harus sukses kedepan demi menjaga nama baik keluarga.
9. Seluruh keluarga besar Penulis yang telah mendukung penuh dan memberikan dukungan moril dan materiil kepada Penulis sejak awal memasuki perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman yang telah menemani dan membantu Penulis dalam perkuliahan.

Demikian Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Penulis,



Mochamad Rizky Ferdiansyah R.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	v
ABSTRAKSI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Demokrasi.....	18
B. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	25
C. Tinjauan Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi	32
D. Tinjauan Tentang Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	36
E. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim	41
BAB III.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.....	44
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.....	50
C. Implikasi Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi.....	92
BAB IV.....	108
PENUTUP.....	108

A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	116



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara*, terj. Somardi, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2020)

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terj. Raisul Muttaqin, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2019)

Hans Kelsen, *Demokrasi: Esensi dan Nilainya*, terj. A. Rahman Zainuddin (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

JURNAL/SKRIPSI

Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). *TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS* (Vol. 07, Issue 1).

Muhammad Anwar Soleh, & Durohim Amnan. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(3), 116–127.

Muhammad Anwar Soleh, & Durohim Amnan. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(3), 116–127.

- Fikri, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Amsir Law Journal*, 6(1), 40–55.
- Hartono, H., & Info, A. (2024). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*
THE URGENCY OF MK RULING NUMBER 60/PUU-XXII/2024 REGARDING THE ORGANIZATION OF THE 2024 ELECTION.
- Latifah, N., Nurmaini, N., Putra, M. I. E., Hidayat, H., & As Sayfullooh, I. (2024). KEBIJAKAN ZONASI DALAM TIMBANGAN TEORI JUSTICE AS FAIRNESS JOHN RAWLS. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 15(2), 181–193.
- Tripantang, J., & Else Suhaimi Abstrak, O. (n.d.). *IMPLIKASI POLITIK AMBANG BATAS PENCALONAN PEJABAT PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA.*
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17.
- Gunawan, M. S., Al-Mustla, A., Jurnal, :, Keislaman, I.-I., Kemasyarakatan, D., & Mujahidah, N. (n.d.). *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU RI.*
- Redaksi, A., Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, F., Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede, J., Ilir Bar, K. I., Palembang, K., Selatan, S.,

KEADILAN JOHN RAWLS Oleh, K., & Dian Pratama, A. (n.d.). *JURNAL THENGKYANG Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang.*

Darma Kardeli, S., Sumatera Ulak Karang Padang, J., & Barat, S. (2018). *PRINSIP CHECK AND BALLANCES* (Vol. 26, Issue 1).

Adam, H., & Airlangga Jl Airlangga No, U. (2017). DISSENTING OPINION DAN CONCURRING OPINION DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2).

Fadhilah-Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan. (n.d.).

Oleh, D., Fakultas, M., Ah, S. ', & Hukum, D. (n.d.). *PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DITINJAU MENURUT PRINSIP DEMOKRASI SKRIPSI.*

Bawah, D., Noor, P. :, Aziz, M., & Nasional, H. (2009). *LAPORAN AKHIR PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH.*

Mencapai Gelar, G., Hukum, S., Syariah, F., & Hukum, D. (n.d.). *PROGRAM STUDI ILMU HUKUM.*

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BATAS WAKTU BAKAL CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF HUKUM. (n.d.).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



LAMPIRAN

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Mochamad Rizky Ferdiansyah Ramadhani

Nim : 202110110311410

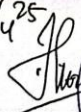
Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala
Daerah Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI

25/4/25




Malang, 24 April 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum